



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/97/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik;
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Badan Publik perlu membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

a. Pembina

1. Fungsi :

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

2. Tugas :

- a) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- b) mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

b. Pengarah

1. Fungsi :

- a) mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b) menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- d) sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik; dan
- e) memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

2. Tugas :

- a) memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- b) memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- c) memberikan rekomendasi kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan; dan

- d) memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

c. Tim Pertimbangan

1. Fungsi :

melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

2. Tugas :

- a) membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b) memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c) memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

1. Fungsi :

- a) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Tugas :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c) mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan

dokumentasi kepada publik;

- e) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g) melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;
- h) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- j) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
- l) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1. Fungsi :

melaksanakan pengelolaan informasi, dokumentasi arsip, pelayanan informasi, pelayanan dan penyelesaian sengketa.

2. Tugas :

- a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- c) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

dan

- f) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf f) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

1. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan perundang-undangan; dan
2. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari

1. Fungsi :

Bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik nagari yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di nagari.

2. Tugas :

- a) Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di pemerintahan nagari;
- b) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam hal pengelolaan seluruh informasi publik nagari;
- c) Mengumpulkan seluruh informasi publik di Nagari yang meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta;
- d) Menyediakan dan mengumumkan seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintahan Nagari melalui media yang secara efektif dapat menjangkau masyarakat dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami;
- e) Melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik di Nagari dengan berkoordinasi dengan PPID Utama;
- f) Menyusun Laporan layanan informasi publik PPID Nagari dengan merekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan

dan jumlah sengketa informasi.

- g. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b) melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - c) melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi, dan melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e) menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - f) menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
- h. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - b) melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
 - c) menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
 - d) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 - e) melaksanakan identifikasi data dan informasi;
 - f) melaksanakan klasifikasi data dan informasi.
- i. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b) membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- j. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
 - c) menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi;
 - d) menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

- k. Administrator/Petugas Layanan Informasi PPID Utama, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
 - b) memverifikasi informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Nagari yang sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi melalui website;
 - c) menerima permohonan informasi publik dan pengaduan yang dilakukan melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung;
 - d) membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
 - e) mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
 - f) melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan informasi publik;
 - g) melakukan komunikasi, klasifikasi dan memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi;
 - h) membuat daftar informasi publik yang telah disahkan oleh PPID Utama;
 - i) membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala.

KETIGA : Kepada Tenaga Administrator/Petugas Layanan Informasi Non Pegawai Negeri Sipil diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Januari 2021



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/97 /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 12 JANUARI 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2021

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN
1.	Pembina	1. Bupati Pesisir Selatan 2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 18. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan; 20. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; 22. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; 23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan; 24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; 25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan; 26. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan; 27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan; 28. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan; 29. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan; 30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan; 31. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; 32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; 33. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan; 34. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; 35. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 36. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan; 37. Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; 38. Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
--	--	---

		39. Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan; 40. Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; 41. Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan; 42. Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; 43. Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan; 44. Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan; 45. Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan; 46. Camat Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan; 47. Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan; 48. Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 49. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 50. Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; 51. Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; 52. Wali Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan; 53. Wali Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan; 54. Wali Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan; 55. Wali Nagari Barung-Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 56. Wali Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan; 57. Wali Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan; 58. Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 59. Wali Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan; 60. Wali Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan; 61. Wali Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 62. Wali Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan; 63. Wali Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 64. Wali Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 65. Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 66. Wali Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 67. Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 68. Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan;
--	--	--

		69. Wali Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 70. Wali Nagari Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan; 71. Wali Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 72. Wali Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan; 73. Wali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan; 74. Wali Nagari Barung-Barung Belantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan; 75. Wali Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang; 76. Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang; 77. Wali Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang; 78. Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang; 79. Wali Nagari Api Api Pasar Baru Kecamatan Bayang; 80. Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang; 81. Wali Nagari Asam Kumbang Pasar Baru Kecamatan Bayang; 82. Wali Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang; 83. Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang; 84. Wali Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang; 85. Wali Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang; 86. Wali Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang; 87. Wali Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang; 88. Wali Nagari Kapujan Koto Berapak Kecamatan Bayang; 89. Wali Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang; 90. Wali Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang; 91. Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang; 92. Wali Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan Bayang Utara; 93. Wali Nagari Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara; 94. Wali Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara; 95. Wali Nagari Muaro Aie Kecamatan Bayang Utara; 96. Wali Nagari Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara;
--	--	---

		97. Wali Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 98. Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai; 99. Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai; 100. Wali Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai; 101. Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; 102. Wali Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; 103. Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; 104. Wali Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai; 105. Wali Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; 106. Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; 107. Wali Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai; 108. Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai; 109. Wali Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 110. Wali Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai; 111. Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 112. Wali Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; 113. Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 114. Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 115. Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 116. Wali Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai; 117. Wali Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai; 118. Wali Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 119. Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 120. Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 121. Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 122. Wali Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas; 123. Wali Nagari Taratak Tompatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 124. Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 125. Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 126. Wali Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan
--	--	--

		Batang Kapas; 127. Wali Nagari Taratak Kecamatan Sutera; 128. Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera; 129. Wali Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera; 130. Wali Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera; 131. Wali Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera; 132. Wali Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera; 133. Wali Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera; 134. Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera; 135. Wali Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 136. Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutera; 137. Wali Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 138. Wali Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera; 139. Wali Nagari Kambang Kecamatan Lengayang; 140. Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang; 141. Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang; 142. Wali Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang; 143. Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang; 144. Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang; 145. Wali Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang; 146. Wali Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang; 147. Wali Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang; 148. Wali Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 149. Wali Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir; 150. Wali Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir; 151. Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir; 152. Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 153. Wali Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 154. Wali Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 155. Wali Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir; 156. Wali Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan
--	--	--

		Ranah Pesisir; 157. Wali Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 158. Wali Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 159. Wali Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti; 160. Wali Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 161. Wali Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 162. Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 163. Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 164. Wali Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 165. Wali Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 166. Wali Nagari Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 167. Wali Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 168. Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti; 169. Wali Nagari Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti; 170. Wali Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 171. Wali Nagari Muaro Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 172. Wali Nagari Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 173. Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 174. Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura; 175. Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura; 176. Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura; 177. Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura; 178. Wali Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura; 179. Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura; 180. Wali Nagari Taluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura; 181. Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura; 182. Wali Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura; 183. Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura
--	--	--

		Kecamatan Airpura;
		184. Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
		185. Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
		186. Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
		187. Wali Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal;
		188. Wali Nagari Kudo Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
		189. Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal;
		190. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
		191. Wali Nagari Tiga Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
		192. Wali Nagari Taluk Ampalu Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
		193. Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal;
		194. Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		195. Wali Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		196. Wali Nagari Talang Balirik Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		197. Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		198. Wali Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		199. Wali Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		200. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		201. Wali Nagari Kampung Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		202. Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		203. Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
		204. Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
		205. Wali Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
		206. Wali Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
		207. Wali Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
		208. Wali Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
		209. Wali Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
		210. Wali Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan

		Basa Ampek Balai Tapan; 211. Wali Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 212. Wali Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 213. Wali Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 214. Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang; 215. Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; 216. Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; 217. Wali Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang; 218. Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; 219. Wali Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang; 220. Wali Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang; 221. Wali Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang; 222. Wali Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang; 223. Wali Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang; 224. Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut; 225. Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; 226. Wali Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; 227. Wali Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut; 228. Wali Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; 229. Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; 230. Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; 231. Wali Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; 232. Wali Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut; dan 233. Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	a. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan 5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan

		2. Kepala Seksi Layanan <i>e-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan 2. Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Petugas Informasi
	d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan; 16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

		18. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan; 20. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan; 21. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan; 22. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan; 23. Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; 24. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; 25. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan; 26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; 27. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 28. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan; 29. Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; 30. Sekretaris Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan; 31. Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan; 32. Sekretaris Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; 33. Sekretaris Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan; 34. Sekretaris Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; 35. Sekretaris Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan; 36. Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan; 37. Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan; 38. Sekretaris Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan; 39. Sekretaris Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan; 40. Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 41. Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 42. Sekretaris Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
--	--	---

	43. Sekretaris Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; 44. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 45. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 46. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 47. Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 48. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 49. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 50. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 51. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 52. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 53. Kepala Bagian Humas dan Protokoler pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 54. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 55. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 56. Sekretaris Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan; 57. Sekretaris Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan; 58. Sekretaris Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan; 59. Sekretaris Nagari Barung Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 60. Sekretaris Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan; 61. Sekretaris Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan; 62. Sekretaris Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 63. Sekretaris Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan; 64. Sekretaris Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan; 65. Sekretaris Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
--	---

		66. Sekretaris Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan; 67. Sekretaris Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 68. Sekretaris Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 69. Sekretaris Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 70. Sekretaris Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 71. Sekretaris Nagari Carocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 72. Sekretaris Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan; 73. Sekretaris Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 74. Sekretaris Nagari Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan; 75. Sekretaris Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 76. Sekretaris Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan; 77. Sekretaris Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan; 78. Sekretaris Nagari Barung Barung Belantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan; 79. Sekretaris Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang; 80. Sekretaris Nagari Talaok Kecamatan Bayang; 81. Sekretaris Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang; 82. Sekretaris Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang; 83. Sekretaris Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang; 84. Sekretaris Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang; 85. Sekretaris Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang; 86. Sekretaris Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang; 87. Sekretaris Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang; 88. Sekretaris Nagari Aur Begalung Talalok Kecamatan Bayang; 89. Sekretaris Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang; 90. Sekretaris Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang; 91. Sekretaris Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang; 92. Sekretaris Nagari Kapujan Koto Berapak Kecamatan Bayang; 93. Sekretaris Nagari Gurun Panjang Utara
--	--	--

		Kecamatan Bayang; 94. Sekretaris Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang; 95. Sekretaris Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang; 96. Sekretaris Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan Bayang Utara; 97. Sekretaris Nagari Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara; 98. Sekretaris Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara; 99. Sekretaris Nagari Muaro Aie Kecamatan Bayang Utara; 100. Sekretaris Nagari Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 101. Sekretaris Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 102. Sekretaris Nagari Salido Kecamatan IV Jurai; 103. Sekretaris Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai; 104. Sekretaris Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai; 105. Sekretaris Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; 106. Sekretaris Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; 107. Sekretaris Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; 108. Sekretaris Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai; 109. Sekretaris Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; 110. Sekretaris Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; 111. Sekretaris Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai; 112. Sekretaris Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai; 113. Sekretaris Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 114. Sekretaris Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai; 115. Sekretaris Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 116. Sekretaris Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; 117. Sekretaris Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 118. Sekretaris Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 119. Sekretaris Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 120. Sekretaris Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai; 121. Sekretaris Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai;
--	--	--

		122. Sekretaris Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 123. Sekretaris Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 124. Sekretaris Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 125. Sekretaris Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 126. Sekretaris Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas; 127. Sekretaris Nagari Taratak Tompatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 128. Sekretaris Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 129. Sekretaris Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 130. Sekretaris Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas; 131. Sekretaris Nagari Taratak Kecamatan Sutera; 132. Sekretaris Nagari Surantih Kecamatan Sutera; 133. Sekretaris Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera; 134. Sekretaris Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera; 135. Sekretaris Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera; 136. Sekretaris Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera; 137. Sekretaris Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera; 138. Sekretaris Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera; 139. Sekretaris Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 140. Sekretaris Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutera; 141. Sekretaris Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 142. Sekretaris Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera; 143. Sekretaris Nagari Kambang Kecamatan Lengayang; 144. Sekretaris Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang; 145. Sekretaris Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang; 146. Sekretaris Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang; 147. Sekretaris Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang; 148. Sekretaris Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang; 149. Sekretaris Nagari Lakitan Selatan Kecamatan
--	--	--

		Lengayang; 150. Sekretaris Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang; 151. Sekretaris Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang; 152. Sekretaris Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 153. Sekretaris Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir; 154. Sekretaris Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir; 155. Sekretaris Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir; 156. Sekretaris Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 157. Sekretaris Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 158. Sekretaris Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 159. Sekretaris Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir; 160. Sekretaris Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir; 161. Sekretaris Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 162. Sekretaris Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 163. Sekretaris Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti; 164. Sekretaris Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 165. Sekretaris Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 166. Sekretaris Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 167. Sekretaris Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 168. Sekretaris Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 169. Sekretaris Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 170. Sekretaris Nagari Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 171. Sekretaris Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 172. Sekretaris Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti; 173. Sekretaris Nagari Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti; 174. Sekretaris Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 175. Sekretaris Nagari Muaro Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 176. Sekretaris Nagari Muaro Gadang Air Haji
--	--	---

		Kecamatan Linggo Sari Baganti; 177. Sekretaris Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 178. Sekretaris Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura; 179. Sekretaris Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura; 180. Sekretaris Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura; 181. Sekretaris Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura; 182. Sekretaris Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura; 183. Sekretaris Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura; 184. Sekretaris Nagari Taluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura; 185. Sekretaris Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura; 186. Sekretaris Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura; 187. Sekretaris Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura; 188. Sekretaris Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 189. Sekretaris Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 190. Sekretaris Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 191. Sekretaris Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal; 192. Sekretaris Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 193. Sekretaris Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal; 194. Sekretaris Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 195. Sekretaris Nagari Tiga Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 196. Sekretaris Nagari Taluk Ampalu Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 197. Sekretaris Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal; 198. Sekretaris Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 199. Sekretaris Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 200. Sekretaris Nagari Talang Balirik Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 201. Sekretaris Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 202. Sekretaris Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 203. Sekretaris Nagari Sungai Pinang Tapan
--	--	---

		Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 204. Sekretaris Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 205. Sekretaris Nagari Kampung Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 206. Sekretaris Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 207. Sekretaris Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 208. Sekretaris Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 209. Sekretaris Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 210. Sekretaris Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 211. Sekretaris Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 212. Sekretaris Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 213. Sekretaris Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 214. Sekretaris Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 215. Sekretaris Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 216. Sekretaris Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 217. Sekretaris Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 218. Sekretaris Nagari Lunang Kecamatan Lunang; 219. Sekretaris Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; 220. Sekretaris Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; 221. Sekretaris Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang; 222. Sekretaris Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; 223. Sekretaris Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang; 224. Sekretaris Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang; 225. Sekretaris Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang; 226. Sekretaris Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang; 227. Sekretaris Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang; 228. Sekretaris Nagari Silaut Kecamatan Silaut; 229. Sekretaris Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; 230. Sekretaris Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; 231. Sekretaris Nagari Sungai Pulai Kecamatan
--	--	---

		Silaut; 232. Sekretaris Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; 233. Sekretaris Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; 234. Sekretaris Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; 235. Sekretaris Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; 236. Sekretaris Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut; dan 237. Sekretaris Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
6	Administrator dan Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	1. Hendika Yusra, S.T. NIP. 19910109 201903 1 001 (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Wulan Syaftira, S.Si. (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 3. Sri Dewigusmi, A.Md. (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/ 97 /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 12 JANUARI 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

